



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 98 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG PENUGASAN GUBERNUR ATAU  
BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN  
PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN YANG  
DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan telah terjadi perubahan penugasan gubernur atau bupati/wali kota untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan yang didanai melalui dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2018 terkait dengan usulan baru, alokasi anggaran, dan/atau lokasi pasar pada Kota Lhokseumawe, Kabupaten Waropen, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Utara,

Kabupaten Gowa, Kabupaten Luwu, Kabupaten Takalar, Kabupaten Muna dan Kabupaten Bombana;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
16. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi melalui Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 26);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 318) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 639);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 864) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 September 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1319

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

## LAMPIRAN

## PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR 98 TAHUN 2018

## TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/ REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALIASI SARANA PERDAGANGAN YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018

## TAHAP I

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
I	PROVINSI ACEH			
	1. Bupati Aceh Utara	C	Krueng Mane	6.000.000.000
II	PROVINSI SUMATERA UTARA			
	2. Bupati Mandailing Natal	C	Natal	6.000.000.000
		C	Maga	6.000.000.000
	3. Wali Kota Medan	C	Sentosa Baru	6.000.000.000
	4. Wali Kota Pematang Siantar	C	Balairong Rajawali	6.000.000.000
	5. Bupati Toba Samosir	C	Laguboti	6.000.000.000
	6. Bupati Karo	C	Munte	6.000.000.000
	7. Bupati Samosir	-	Pangururan	6.000.000.000
	8. Bupati Pakpak Bharat	C	Sukarame	6.000.000.000
9. Bupati Tapanuli Selatan	C	Simataniari	6.000.000.000	



NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	10. Bupati Labuhan Batu Selatan	C	Cikampak	6.000.000.000
		C	Sungai Kanan	6.000.000.000
	11. Bupati Deli Serdang	C	Tanjung Morawa	6.000.000.000
	12. Bupati Tapanuli Tengah	C	Pinangsori	6.000.000.000
III	PROVINSI SUMATERA BARAT			
	13. Bupati Kepulauan Mentawai	C	Ibu	6.000.000.000
	14. Bupati Solok	C	Talang	6.000.000.000
	15. Wali Kota Padang	C	Raya Blok Bagonjong	6.000.000.000
	16. Bupati Pesisir Selatan	C	Batang Kapas	6.000.000.000
IV	PROVINSI KEPULAUAN RIAU			
	17. Bupati Natuna	C	Ranai	6.000.000.000
	18. Wali Kota Batam	C	Makmur Serumpun	6.000.000.000
	19. Bupati Lingga	C	Daik Bandar Madani	6.000.000.000
V	PROVINSI JAMBI			
	20. Bupati Tanjung Jabung Barat	C	Watik	6.000.000.000
	21. Bupati Muaro Jambi	C	Sengeti	6.000.000.000
	22. Bupati Bungo	C	Rantau Pandan	6.000.000.000
VI	PROVINSI SUMATERA SELATAN			
	23. Wali Kota Palembang	C	Sako Sematang Borang	6.000.000.000
	24. Bupati Banyuasin	C	Baru Pangkalan Balai	6.000.000.000
	25. Bupati Ogan Komering Ulu	C	Marga Bhakti	6.000.000.000
	26. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan	C	Gemiung	6.000.000.000
	27. Wali Kota Prabumulih	C	Gunung Ibul	6.000.000.000
VII	PROVINSI BANGKA BELITUNG			
	28. Bupati Bangka Selatan	C	Payung	6.000.000.000
VIII	PROVINSI BENGKULU			
	29. Bupati Seluma	C	Serambi Gunung	6.000.000.000
	30. Bupati Bengkulu Utara	C	Sukamakmur	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	31. Bupati Lebong	C	Pelabuhan Talang Leak	6.000.000.000
IX	PROVINSI LAMPUNG			
	32. Bupati Lampung Timur	C	Way Jepara	6.000.000.000
		C	Pekalongan II	6.000.000.000
	33. Bupati Mesuji	C	Simpang Pematang	6.000.000.000
34. Bupati Pesisir Barat	C	Way Batu II	6.000.000.000	
X	PROVINSI BANTEN			
	35. Bupati Serang	C	Padarincang	6.000.000.000
	36. Bupati Pandeglang	C	Cibaliung	6.000.000.000
XI	PROVINSI JAWA BARAT			
	37. Wali Kota Tasikmalaya	C	Awipari	6.000.000.000
	38. Bupati Indramayu	C	Kandanghaur	6.000.000.000
	39. Bupati Sukabumi	C	Surade	6.000.000.000
	40. Wali Kota Sukabumi	C	Lembur Situ	6.000.000.000
	41. Bupati Purwakarta	C	Wanayasa	6.000.000.000
	42. Wali Kota Bekasi	C	Harapan Jaya	6.000.000.000
XII	PROVINSI JAWA TENGAH			
	43. Bupati Purbalingga	C	Tobong	6.000.000.000
	44. Bupati Magelang	-	Tempuran	6.000.000.000
	45. Bupati Pekalongan	C	Doro	6.000.000.000
	46. Bupati Rembang	C	Tegaldowo	6.000.000.000
	47. Bupati Boyolali	C	Cepogo	6.000.000.000
	48. Bupati Demak	C	Bango	6.000.000.000
	49. Bupati Wonogiri	C	Bulukerto	6.000.000.000
	50. Bupati Blora	C	Cepu	6.000.000.000
	51. Bupati Sragen	C	Blimbing	6.000.000.000
	52. Bupati Klaten	C	Jatinom	6.000.000.000
	53. Wali Kota Surakarta	-	Tunggul Sari	6.000.000.000
	54. Bupati Wonosobo	C	Pagi Wonosobo	6.000.000.000
	55. Bupati Kendal	C	Kendal	6.000.000.000
56. Bupati Kudus	C	Baru	6.000.000.000	

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	57. Wali Kota Semarang	C	Banyumanik	6.000.000.000
	58. Bupati Kebumen	C	Kabekelan	6.000.000.000
	59. Bupati Karanganyar	C	Karangpandan	6.000.000.000
XIII	PROVINSI D.I. YOGYAKARTA			
	60. Bupati Bantul	C	Barongan	6.000.000.000
	61. Bupati Gunungkidul	C	Legundi	6.000.000.000
XIV	PROVINSI JAWA TIMUR			
	62. Bupati Pasuruan	C	Sukorejo	6.000.000.000
		C	Grati	6.000.000.000
	63. Bupati Trenggalek	C	Gandusari	6.000.000.000
	64. Bupati Pamekasan	C	Palenggaan	6.000.000.000
	65. Bupati Ponorogo	C	Sawoo I	6.000.000.000
	66. Bupati Situbondo	C	Panji	6.000.000.000
	67. Wali Kota Blitar	C	Templek	6.000.000.000
	68. Bupati Banyuwangi	C	Gendoh 2	6.000.000.000
	69. Bupati Malang	C	Dampit Unit Punden	6.000.000.000
		C	Bululawang	6.000.000.000
	70. Bupati Sumenep	C	Ganding	6.000.000.000
	71. Bupati Probolinggo	C	Bantaran	6.000.000.000
	72. Wali Kota Malang	C	Bunulrejo	6.000.000.000
	73. Bupati Sampang	C	Margalela 2	6.000.000.000
XV	PROVINSI BALI			
	74. Bupati Tabanan	C	Tradisional Kediri	6.000.000.000
	75. Bupati Buleleng	C	Sumber Kima	6.000.000.000
	76. Kota Denpasar	C	Kerta Waringin Sari	6.000.000.000
	77. Bupati Gianyar	C	Silakarang	6.000.000.000
	78. Bupati Bangli	C	Desa Catur	6.000.000.000
XVI	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT			
	79. Bupati Lombok Timur	C	Apitaik	6.000.000.000
	80. Bupati Lombok Tengah	-	Mandalika	6.000.000.000
	81. Bupati Lombok Barat	C	Gerung	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	82. Bupati Bima	D	Woha II	4.000.000.000
XVII	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR			
	83. Bupati Malaka	C	Bei Bria	6.000.000.000
	84. Bupati Manggarai Barat	-	Batu Cermin	6.000.000.000
	85. Bupati Flores Timur	C	Waiwerang	6.000.000.000
	86. Bupati Timor Tengah Utara	C	Kefamenanu 2	6.000.000.000
	87. Bupati Sumba Timur	C	Kilometer 4 Kambajawa	6.000.000.000
	88. Bupati Kupang	C	Lili	6.000.000.000
	89. Bupati Manggarai	C	Puni	6.000.000.000
XVIII	PROVINSI KALIMANTAN BARAT			
	90. Bupati Bengkayang	C	Sumbawa	6.000.000.000
	91. Bupati Ketapang	C	Rangga Sentap	6.000.000.000
	92. Bupati Melawi	C	Nangapinoh	6.000.000.000
	93. Wali Kota Pontianak	C	Flamboyan	6.000.000.000
	94. Bupati Sintang	C	Nanga Mau	6.000.000.000
	95. Bupati Kapuas Hulu	C	Dogom Permai	6.000.000.000
XIX	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			
	96. Bupati Barito Utara	C	Tumpang Laung	6.000.000.000
	97. Bupati Barito Timur	C	Ampah	6.000.000.000
	98. Bupati Murung Raya	C	Pelita Hulu	6.000.000.000
XX	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN			
	99. Bupati Barito Kuala	C	Marabahan Timur	6.000.000.000
	100. Bupati Hulu Sungai Selatan	C	Terpadu	6.000.000.000
	101. Wali Kota Banjarbaru	C	Laura	6.000.000.000
XXI	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			
	102. Wali Kota Samarinda	C	Harapan Baru	6.000.000.000
	103. Bupati Kutai Timur	C	Benua Baru	6.000.000.000
	104. Wali Kota Balikpapan	C	Teritip	6.000.000.000
	105. Bupati Penajam Paser Utara	C	Babulu	6.000.000.000
XXII	PROVINSI KALIMANTAN UTARA			
	106. Bupati Malinau	C	Kanaan	6.000.000.000
	107. Bupati Nunukan	C	Desa Makmur Kecamatan Tulin Onsoi	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	108. Bupati Bulungan	C	Tanjung Selor	6.000.000.000
XXIII	PROVINSI SULAWESI UTARA			
	109. Bupati Siau Tagulandang Biaro	C	Ulu Siau	6.000.000.000
	110. Wali Kota Tomohon	C	Beriman 3	6.000.000.000
	111. Bupati Bolaang Mongondow	C	Imandi	6.000.000.000
	112. Bupati Kepulauan Sangihe	C	Naha	6.000.000.000
XXIV	PROVINSI SULAWESI SELATAN			
	113. Bupati Gowa	C	Limbung	6.000.000.000
	114. Bupati Toraja Utara	C	Bolu	6.000.000.000
	115. Bupati Luwu Timur	C	Solo	6.000.000.000
		C	Wotu	6.000.000.000
	116. Bupati Bulukumba	C	Balimbing	6.000.000.000
	117. Bupati Jeneponto	C	Tolo	6.000.000.000
	118. Bupati Sidenreng Rappang	C	Amparita	6.000.000.000
	119. Bupati Pinrang	C	Suppa	6.000.000.000
	120. Bupati Takalar	C	Malolo	6.000.000.000
	121. Bupati Kepulauan Selayar	C	Polebunging	6.000.000.000
	122. Bupati Soppeng	C	Lalabata I	6.000.000.000
	123. Bupati Barru	C	Takkalasi	6.000.000.000
	124. Bupati Enrekang	C	Baraka	6.000.000.000
	125. Bupati Luwu	C	Suli	6.000.000.000
	126. Bupati Tana Toraja	C	Rantetayo	6.000.000.000
XXV	PROVINSI SULAWESI TENGAH			
	127. Bupati Morowali	C	Bumi Raya	6.000.000.000
	128. Bupati Banggai Kepulauan	C	Tompudau	6.000.000.000
	129. Bupati Banggai Laut	C	Banggai	6.000.000.000
	130. Bupati Morowali Utara	C	Taliwan Mori Utara	6.000.000.000
		C	Lemba Sumara	6.000.000.000
	131. Bupati Donggala	C	Damsol	6.000.000.000
	132. Bupati Buol	C	Paleleh	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	133. Bupati Sigi	C	Sigi Biromaru	6.000.000.000
	134. Bupati Toli Toli	C	Dakopemean	6.000.000.000
	135. Bupati Tojo Una Una	C	Desa Matako	6.000.000.000
XXVI	PROVINSI GORONTALO			
	136. Bupati Bone Bolango	C	Modern Bone Bolango	6.000.000.000
	137. Bupati Pohuwatu	C	Lemito	6.000.000.000
	138. Bupati Boalemo	C	Bongo Dua	6.000.000.000
XXV	PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
II	139. Bupati Konawe Selatan	C	Ambai Pua	6.000.000.000
	140. Bupati Buton Tengah	C	Sangia Wambulu	6.000.000.000
	141. Bupati Muna Barat	C	Tiworo	6.000.000.000
	142. Bupati Muna	C	Liangkobori	6.000.000.000
	143. Bupati Konawe Utara	C	Lamonae	6.000.000.000
	144. Bupati Buton Selatan	C	Siompu	6.000.000.000
	145. Bupati Buton Utara	C	Sentral Kulisusu	6.000.000.000
	146. Bupati Buton	C	Ambuau Indah	6.000.000.000
	147. Bupati Bombana	C	Dongkala	6.000.000.000
	148. Bupati Konawe Kepulauan	C	Konkep	6.000.000.000
XXV	PROVINSI SULAWESI BARAT			
III	149. Bupati Mamasa	C	Balla	6.000.000.000
	150. Bupati Mamuju	C	Papalang	6.000.000.000
	151. Bupati Mamuju Tengah	C	Sulobaja	6.000.000.000
	152. Bupati Mamuju Utara	C	Limua	6.000.000.000
XXIX	PROVINSI MALUKU UTARA			
	153. Bupati Halmahera Tengah	C	Wairoro	6.000.000.000
	154. Bupati Halmahera Utara	C	Wosia	6.000.000.000
	155. Bupati Halmahera Timur	C	Maba	6.000.000.000
	156. Bupati Halmahera Barat	C	Akelamo	6.000.000.000
	157. Wali Kota Tidore Kepulauan	C	Gosalaha	6.000.000.000
	158. Wali Kota Ternate	C	Rempah-Rempah	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	159. Bupati Pulau Morotai	C	Darame	6.000.000.000
XXX	PROVINSI MALUKU			
	160. Bupati Maluku Tenggara Barat	C	Saumlaki	6.000.000.000
	161. Bupati Seram Bagian Barat	C	Kota Piru II	6.000.000.000
	162. Wali Kota Ambon	C	Kampung Terpadu	6.000.000.000
	163. Bupati Maluku Tengah	C	Wahai	6.000.000.000
XXX	PROVINSI PAPUA BARAT			
I	164. Bupati Maybrat	C	Ayamuru	6.000.000.000
	165. Bupati Sorong Selatan	C	Moswaren	6.000.000.000
	166. Bupati Teluk Bintuni	C	Babo	6.000.000.000
	167. Bupati Pegunungan Arfak	C	Yosmar	6.000.000.000
	168. Bupati Manokwari	C	Sidey Jaya	6.000.000.000
	169. Bupati Teluk Wondama	C	Windesi	6.000.000.000
XXX	PROVINSI PAPUA			
II	170. Bupati Dogiyai	C	Mapia Induk	6.000.000.000
	171. Bupati Tolikara	C	Tolikara	6.000.000.000
	172. Bupati Supiori	C	Sorendiwari	6.000.000.000
	173. Bupati Keerom	C	Arso	6.000.000.000
	174. Bupati Mamberamo Tengah	C	Eragayam	6.000.000.000
TOTAL				1.084.000.000.000

TAHAP II

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
I	PROVINSI ACEH			
	1. Bupati Aceh Utara	C	Kecamatan Syamtalira Aron	6.000.000.000
		C	Gampong Paya Dua	6.000.000.000
	2. Wali Kota Lhokseumawe	C	Ujong Blang	6.000.000.000
		C	Induk Terpadu Kecamatan Bandar Sakti	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	3. Bupati Aceh Tenggara	C	Lawe Habun Jaya	6.000.000.000
		C	Tanoh Alas	6.000.000.000
	4. Bupati Aceh Tengah	C	Paya Ilang	6.000.000.000
II	PROVINSI SUMATERA UTARA			
	5. Bupati Serdang Bedagai	C	Sei Rampah II	6.000.000.000
III	PROVINSI SUMATERA SELATAN			
	6. Bupati Musi Banyuasin	C	Bero Jaya Timur	6.000.000.000
	7. Bupati Ogan Ilir	C	Desa Seri Bandung	6.000.000.000
	8. Bupati Ogan Komering Ulu Timur	C	Rawa Bening	6.000.000.000
	9. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir	C	Desa Betung	6.000.000.000
IV	PROVINSI LAMPUNG			
	10. Bupati Pesawaran	C	Sukaraja	6.000.000.000
		C	Batanghari Ogan	6.000.000.000
V	PROVINSI JAWA BARAT			
	11. Bupati Subang	C	Sagalaherang	6.000.000.000
VI	PROVINSI JAWA TENGAH			
	12. Bupati Wonogiri	C	Wuryantoro	6.000.000.000
	13. Bupati Pati	C	Kayen	6.000.000.000
	14. Bupati Banyumas	C	Buntu	6.000.000.000
	15. Bupati Rembang	C	Sumber	6.000.000.000
	16. Bupati Batang	C	Wonotunggal	6.000.000.000
	17. Bupati Grobogan	C	Wirosari	6.000.000.000
	18. Bupati Blora	C	Todanan	6.000.000.000
VII	PROVINSI JAWA TIMUR			
	19. Bupati Bondowoso	C	Kejayan II	6.000.000.000
		C	Maesan	6.000.000.000
	20. Bupati Ponorogo	C	Sumoroto	6.000.000.000
VIII	PROVINSI BALI			
	21. Kabupaten Karangasem	C	Desa Pempatan	6.000.000.000
IX	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR			
	22. Bupati Lembata	C	Kecamatan Nubatukan	6.000.000.000
X	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			
	23. Bupati Kotawaringin Barat	C	Cempaka	6.000.000.000



NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
XI	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			
	24. Bupati Kutai Kartanegara	C	Kuala Samboja	6.000.000.000
	25. Bupati Kutai Timur	C	Induk Kecamatan Kongbeng	6.000.000.000
		C	Induk Kecamatan Sangatta Utara	6.000.000.000
XII	PROVINSI SULAWESI UTARA			
	26. Bupati Minahasa Selatan	C	Mondinding	6.000.000.000
		C	Wanga	6.000.000.000
	27. Bupati Bolaang Mongondow	C	Buntalo	6.000.000.000
XIII	PROVINSI SULAWESI SELATAN			
	28. Bupati Wajo	C	Paneki	6.000.000.000
		C	Mini Kelurahan Siengkang	6.000.000.000
		C	Jalang	6.000.000.000
	29. Bupati Gowa	C	Tombolopao	6.000.000.000
	30. Bupati Bone	C	Bulu-Bulu	6.000.000.000
		C	Apala	6.000.000.000
	31. Bupati Bantaeng	C	Panaikang	6.000.000.000
		C	Sentral Kel. Bonto Sunggu	6.000.000.000
	32. Bupati Barru	C	Bulo-Bulo	6.000.000.000
	33. Bupati Maros	C	Sakeang Benteng Gajah	6.000.000.000
		C	Bonto Matinggi	6.000.000.000
	34. Bupati Jeneponto	C	Bulujaya	6.000.000.000
	35. Bupati Kepulauan Selayar	C	Garaupa	6.000.000.000
		C	Kecamatan Takabonerate	6.000.000.000
		C	Patikarya	6.000.000.000
	36. Bupati Luwu	C	Noling	6.000.000.000
		C	Bua II	6.000.000.000
	37. Bupati Takalar	C	Jonggoa	6.000.000.000
		C	Bulukunyi	6.000.000.000
	38. Bupati Toraja Utara	C	Pangala	6.000.000.000
	39. Bupati Sinjai	C	Mananti	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
XIV	PROVINSI SULAWESI TENGAH			
	40. Bupati Morowali	C	Kolono	6.000.000.000
	41. Bupati Banggai	C	Toili	6.000.000.000
XV	PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
	42. Bupati Kolaka Utara	C	Watumea	6.000.000.000
		C	Desa Pohu	6.000.000.000
	43. Bupati Muna	C	Wakobalu Agung	6.000.000.000
		C	Pola	6.000.000.000
	44. Bupati Buton Utara	C	Wantulasi	6.000.000.000
	45. Bupati Buton Tengah	C	Lakudo	6.000.000.000
46. Bupati Buton	C	Siotapina	6.000.000.000	
XVI	PROVINSI MALUKU UTARA			
	47. Bupati Kepulauan Sula	C	Manatol Falabisahaya	6.000.000.000
		C	Makdahi Fatce	6.000.000.000
	48. Bupati Pulau Taliabu	C	Bobong	6.000.000.000
	49. Bupati Halmahera Barat	C	Desa Tongute Ternate	6.000.000.000
		C	Desa Gufasa	6.000.000.000
	50. Bupati Pulau Morotai	C	Gotalamo II	6.000.000.000
51. Wali Kota Ternate	C	Dufa Dufa	6.000.000.000	
XVII	PROVINSI MALUKU			
	52. Bupati Buru Selatan	C	Kecamatan Namrole	6.000.000.000
XVIII	PROVINSI PAPUA			
	53. Bupati Waropen	C	Inpres Kampung Uri II	6.000.000.000
		C	Ronggaiwa	6.000.000.000
54. Bupati Yahukimo	C	Kuntre	6.000.000.000	
TOTAL				450.000.000.000

TAHAP III

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
I	PROVINSI LAMPUNG			
	1. Bupati Lampung Timur	-	Sekampung 2	3.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
II	PROVINSI JAWA TENGAH			
	2. Bupati Boyolali	-	Batangan Simo	3.000.000.000
III	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT			
	3. Bupati Lombok Timur	-	Kotaraja 2	2.500.000.000
		-	Montong Beter 2	2.500.000.000
		-	Suela 2	1.500.000.000
		-	Pringgabaya	2.500.000.000
		-	Apitaik 2	2.500.000.000
		-	Pancor 2	2.500.000.000
		-	Wanasaba	1.000.000.000
	4. Bupati Lombok Tengah	-	Pringgarata	2.000.000.000
		-	Puyung	2.000.000.000
		-	Parebali	2.000.000.000
		-	Batu Bungus	2.000.000.000
		-	Mujur	2.000.000.000
		-	Peseng	2.000.000.000
		-	Pelebuh	1.000.000.000
		-	Sengkol	2.500.000.000
	5. Bupati Lombok Barat	-	Bunjeruk	2.000.000.000
		-	Eyat Mayang	2.500.000.000
		-	Narmada	2.500.000.000
	6. Wali Kota Mataram	-	Keru	2.500.000.000
		-	Mandalika	2.100.000.000
		-	<b>Karang Sukun</b>	<b>90.000.000</b>
		-	Kebon Roek	370.000.000
		-	Cakranegara 2	1.600.000.000
		-	Karang Lelede	490.000.000
	-	<b>Otak Desa</b>	<b>51.000.000</b>	
IV	PROVINSI SULAWESI BARAT			
	7. Bupati Mamasa	-	Sumarorong	3.000.000.000
	8. Bupati Mamuju Tengah	-	Tobadak	2.400.000.000
	9. Bupati Mamuju	-	Keang	3.000.000.000
	10. Bupati Mamuju Utara	-	Lariang	2.000.000.000
V	PROVINSI SULAWESI SELATAN			
	11. Bupati Gowa	-	Sapaya	3.000.000.000
	12. Bupati Luwu	-	Lanipa	2.000.000.000
	13. Bupati Takalar	-	Bontorita	2.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
VI	PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
	14. Bupati Muna	-	Oempu	2.000.000.000
	15. Bupati Bombana	-	Toburi	2.500.000.000
TOTAL				72.601.000.000

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,

